

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kontribusi Penelitian.....	17
1.5 Keaslian dan Posisi Penelitian.....	17
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	 23
2.1 Tinjauan Pustaka	23
2.1.1 Kelembagaan Komisi Negara	23
2.1.1.1 Komisi Negara dalam Struktur Kenegaraan.....	24
2.1.1.2 Karakteristik Kelembagaan Komisi Negara Independen..	26
2.1.2 KI Sebagai Lembaga Kuasi Yudikatif dalam Penyelesaian Sengketa Informasi	30
2.2 Landasan Teori	32
2.2.1 Kinerja	32
2.2.1.1 Kriteria Kinerja: Efektivitas dan Efisiensi	33
2.2.1.2 Independensi Sebagai Faktor yang Memengaruhi Kinerja	34
2.2.2 Independensi	40
2.2.2.1 Independensi dari Perspektif Independensi Fungsional, Institusional, dan Administratif.....	40
2.2.2.2 Independensi KI Pusat.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran.....	47
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 50
3.1 Penelitian Kualitatif	50
3.2 Fokus Penelitian.....	56
3.3 Tipe dan Teknik Pengumpulan Data	57
3.4 Teknik Analisis Data	60
3.5 Struktur Analisis	63

BAB IV. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	65
4.1 Pengantar	65
4.2 Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia	65
4.3 Pembentukan KI Pusat: Tarik-Ulur Batasan Independensi	73
4.4 KI Pusat dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Informasi	81
4.5 Rangkuman	86
 BAB V. DINAMIKA RELASI INDEPENDENSI FUNGSIONAL DENGAN KINERJA: DIKOTOMI DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN	 87
5.1 Pengantar	87
5.2 Penetapan Kebijakan Pokok: Dikotomi Fungsi Utama dan Fungsi Tambahan	87
5.2.1 Era Komisioner I: Fokus Fungsi Utama	88
5.2.2 Era Komisioner II: Fokus Melebar ke Fungsi Tambahan	91
5.2.3 Komparasi: Dikotomi Fungsi.....	94
5.3 Penetapan Instrumen Kebijakan: Kontroversi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi	96
5.3.1 Era Komisioner I: Hukum Acara yang Diperbarui Tidak Sempat Diimplementasikan	97
5.3.2 Era Komisioner II: Kegagalan Memperbarui Hukum Acara yang Kontroversial	107
5.3.3 Komparasi: Kontroversi Hukum Acara.....	117
5.4 Penetapan Putusan Perkara: Kontroversi Permohonan yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik	121
5.4.1 Era Komisioner I: Indikasi Permohonan Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik	122
5.4.2 Era Komisioner II: Permohonan Tidak Terkendali.....	131
5.4.3 Komparasi: Kontroversi Permohonan	140
5.5 Rangkuman	143
 BAB VI. DINAMIKA INDEPENDENSI INSTITUSIONAL TERHADAP RELASI INDEPENDENSI FUNGSIONAL DENGAN KINERJA: AMBIGUITAS KELEMBAGAAN	 146
6.1 Pengantar	146
6.2 Legitimasi Kelembagaan: Ambiguitas Kuasi Yudikatif dan Kuasi Eksekutif.....	146
6.2.1 Era Komisioner I: Penguatan Kelembagaan Kuasi Yudikatif	146
6.2.2 Era Komisioner II: Penguatan Fungsi Eksekutif	152
6.2.3 Komparasi: Ambiguitas Kedudukan Lembaga.....	158
6.3 Pertanggungjawaban Kelembagaan: Ambiguitas Sekretariat	160
6.3.1 Era Komisioner I: Sekretariat Merujuk Kebijakan Pokok KI Pusat	160

6.3.2 Era Komisioner II: Sekretariat Merujuk Kebijakan	
Pokok Lembaga Eksekutif	166
6.3.3 Komparasi: Ambiguitas Pertanggungjawaban Sekretariat	171
6.4 Kewenangan Pasca Putusan: Ambiguitas Tindak Lanjut	173
6.4.1 Era Komisioner I: Penguatan Tindak Lanjut.	174
6.4.2 Era Komisioner II: Stagnasi Penguatan Pasca Putusan	181
6.4.3 Komparasi: Ambiguitas Pasca Putusan	190
6.5 Rangkuman	192

BAB VII. DINAMIKA INDEPENDENSI ADMINISTRATIF TERHADAP RELASI INDEPENDENSI FUNGSIONAL DENGAN KINERJA: BIAS SDM, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN

	195
7.1 Pengantar	195
7.2 Pengaturan SDM: Bias Seleksi dan Proporsi Komisioner serta Hierarki Personalia	195
7.2.1 Era Komisioner I: Kontrol LSM dan Pengusulan Sekretaris Mereduksi Bias SDM	196
7.2.2 Era Komisioner II: Konflik Internal	206
7.2.3 Komparasi: Bias Pengaturan	221
7.3 Penentuan Anggaran: Bias Alokasi Anggaran Penyelesaian Sengketa Informasi	225
7.3.1 Era Komisioner I: Alokasi Anggaran Tidak Mencerminkan Fungsi Utama	226
7.3.2 Era Komisioner II: Alokasi Anggaran Penyelesaian Sengketa Minim di Tengah Lonjakan Anggaran KI Pusat	231
7.3.3 Komparasi: Bias Penentuan	237
7.4 Pengawasan Internal: Bias Subjektivitas dan Rujukan	239
7.4.1 Era Komisioner I: Pengawasan Internal Merujuk Kebijakan Pokok KI Pusat	240
7.4.2 Era Komisioner II: Pengawasan Internal Berlangsung Subjektif dan Merujuk Kebijakan Pokok Lembaga Eksekutif	249
7.4.3 Komparasi: Bias Pengawasan	260
7.5 Rangkuman	262

BAB VIII. PENUTUP

8.1 Kesimpulan	266
8.2 Kontribusi Akademis Serta Implikasi Teoritis dan Praktis	285
8.3 Kelemahan Penelitian	287
8.4 Saran	288



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**DINAMIKA RELASI INDEPENDENSI DENGAN KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI:
Studi Kasus di Komisi
Informasi Pusat Tahun 2010-2017**

SRI HANDIMAN S, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA; Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA.....	291
LAMPIRAN	